



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAENURI
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, DAN KEUANGAN
3. NHK : 981306

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.180.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 91 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 227.500.000
4. Tanah Seluas 71 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000
5. Tanah Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
6. Tanah Seluas 31 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
7. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 2.558 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
9. Tanah Seluas 1.686 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
10. Tanah Seluas 2.375 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 164.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA NF125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
5. MOTOR, SUZUKI FO 110 Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 935.670.415

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.280.670.415

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.280.670.415

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.